



## HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Cevin Wirnata Mendrofa<sup>1)</sup>, Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Agroteknologi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia  
Email: [rostianihalawa@gmail.com](mailto:rostianihalawa@gmail.com)

<sup>2)</sup>Agroteknologi, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia  
Email: [hendrikusharefa@gmail.com](mailto:hendrikusharefa@gmail.com)

### Abstract

*In the era of globalization and rapid development of information technology, challenges to national values and national identity are increasingly complex. The younger generation is faced with various foreign cultural influences that can affect their understanding and appreciation of the noble values of the nation. Therefore, Civic Education plays a role as a fortress in maintaining and instilling these values from an early age. As stated by Parawangsa, Dewi, and Furnamasari (2021), Civics Education in Primary Schools focuses on the formation of smart, skilled, and characterized citizens in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. In addition, civic education not only functions as a transfer of knowledge about the political and legal system, but also as a means of shaping the character and morals of students. This is in line with the view that Civics Education aims to foster and increase citizen participation in political and community life, both at the local and national levels.*

**Keywords:** Education, Civics, Law.

### Abstrak

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional semakin kompleks. Generasi muda dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya asing yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penghayatan mereka terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai benteng dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Sebagaimana diungkapkan oleh Parawangsa, Dewi, dan Furnamasari (2021), PKn di Sekolah Dasar memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa PKn bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum.



## PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, PKn menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat karakter, serta membentuk sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, PKn tidak hanya sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian warga negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam sejarahnya, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami berbagai perubahan sesuai dinamika sosial dan politik bangsa. Sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, pendekatan dan tujuan PKn terus berkembang dari sekadar alat legitimasi kekuasaan menuju penguatan kapasitas kritis dan partisipatif warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa PKn merupakan refleksi dari kebutuhan aktual bangsa Indonesia dalam menyiapkan generasi yang memiliki integritas moral, wawasan kebangsaan, serta kesadaran hukum dan politik.

Landasan filosofis PKn bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencerminkan identitas dan cita-cita bangsa. Dalam ranah ilmiah, PKn berakar pada ilmu politik dan studi sosial, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan. Pendekatan ini memberikan legitimasi bahwa PKn bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga akademik dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Di samping itu, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki dasar hukum yang kuat yang diatur dalam berbagai regulasi pendidikan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa PKn wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi,

sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kecakapan hidup bernegara.

Tujuan utama dari PKn adalah membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan, meningkatkan kesadaran hukum dan politik, serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Selain itu, PKn juga berfungsi untuk menanamkan semangat toleransi, saling menghargai dalam keberagaman, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, PKn tidak hanya berorientasi pada aspek intelektual, tetapi juga emosional dan sosial.

Dengan memperhatikan kompleksitas masyarakat Indonesia yang multikultural dan tantangan global yang semakin meningkat, urgensi Pendidikan Kewarganegaraan semakin besar. PKn harus mampu menjawab kebutuhan bangsa dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan tangguh dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dengan demikian, PKn menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan beradab.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk karakter dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi PKn di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah pendidik dan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi di beberapa institusi pendidikan yang berada di wilayah urban dan semi-urban di Indonesia. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan pengalaman belajar PKn.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:



1. Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali pandangan guru, dosen, dan siswa mengenai efektivitas PKn dalam membentuk karakter kebangsaan.
2. Observasi non-partisipatif, dilakukan di dalam kelas selama pembelajaran PKn berlangsung, untuk melihat proses pembelajaran serta interaksi antara guru dan siswa.
3. Studi dokumentasi, berupa analisis terhadap silabus, RPP, modul PKn, serta regulasi pendidikan yang relevan seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2012.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mengelompokkan data berdasarkan keterkaitan antar tema.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Validitas juga diperkuat dengan teknik member checking, yaitu meminta konfirmasi dari informan terkait hasil interpretasi data yang telah dilakukan peneliti.

Penelitian ini bersifat eksploratif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan kurikulum PKn ke depan, serta mendorong implementasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi pembelajaran PKn dalam rangka membentuk generasi muda yang berkarakter, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa yang tinggi.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidik memandang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran yang strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Hal ini terlihat dari komitmen guru

dalam menyampaikan materi yang tidak hanya teoritis, tetapi juga dihubungkan dengan konteks aktual, seperti isu toleransi, demokrasi, dan kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik, diketahui bahwa materi PKn yang disampaikan secara kontekstual dan dialogis lebih mudah dipahami dan berpengaruh dalam pembentukan sikap. Mereka merasa bahwa PKn memberi ruang untuk memahami realitas sosial serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan bangsa.

Dari observasi kelas, terlihat bahwa metode pembelajaran yang bersifat partisipatif, seperti diskusi kelompok dan studi kasus, lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif dalam mengungkapkan pendapat, memahami perbedaan, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan sosial dan kenegaraan.

Pembelajaran PKn yang dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Contohnya, saat guru membahas tema “keadilan sosial” dengan studi kasus tentang distribusi bantuan sosial, siswa menunjukkan empati dan pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya keadilan dalam masyarakat.

Dokumentasi kurikulum menunjukkan bahwa PKn telah diintegrasikan secara formal sebagai mata pelajaran wajib, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2012. Namun, masih ditemukan variasi implementasi antar sekolah, terutama dalam hal kedalaman materi, kreativitas pembelajaran, dan ketersediaan bahan ajar.

Beberapa guru mengungkapkan bahwa kendala utama dalam mengoptimalkan pembelajaran PKn adalah keterbatasan waktu dan dominasi pendekatan hafalan dalam evaluasi pembelajaran. Hal ini menyebabkan materi PKn seringkali hanya dipahami secara permukaan tanpa menyentuh dimensi sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan siswa.

Analisis terhadap silabus dan RPP menunjukkan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam PKn



mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering kali lebih menekankan aspek kognitif, sementara dimensi afektif dan psikomotorik masih kurang ditekankan.

Temuan lain menunjukkan bahwa peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, dan debat Pancasila, memiliki kesadaran kewarganegaraan yang lebih tinggi. Mereka lebih memahami proses demokrasi, menghargai perbedaan, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam komunitas sekolah.

Peran guru sebagai fasilitator sangat menentukan keberhasilan PKn. Guru yang mampu membangun komunikasi yang terbuka dan membimbing siswa dalam mengaitkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan realitas kehidupan sosial berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pembentukan karakter.

PKn juga berkontribusi dalam menumbuhkan toleransi antar peserta didik. Dalam situasi kelas yang heterogen secara suku, agama, dan latar belakang sosial, diskusi PKn dapat menjadi sarana untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural.

Namun, tantangan globalisasi juga menjadi perhatian dalam pembelajaran PKn. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka merasa nilai-nilai lokal dan kebangsaan mulai tergeser oleh budaya luar yang lebih menarik secara visual dan gaya hidup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru PKn dalam menyampaikan materi yang relevan dan menarik.

Pembelajaran berbasis digital juga mulai diterapkan dalam beberapa sekolah, dengan penggunaan video pembelajaran, simulasi, dan platform diskusi daring. Hal ini memberikan peluang bagi inovasi dalam pembelajaran PKn, terutama dalam menjangkau siswa generasi digital. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas guru untuk memanfaatkan teknologi secara optimal.

Dari hasil triangulasi data, ditemukan bahwa keberhasilan PKn dalam membentuk karakter peserta didik sangat bergantung pada sinergi antara kurikulum, strategi pembelajaran, dan keteladanan dari lingkungan sekolah. Ketika nilai-nilai yang diajarkan di kelas juga dipraktikkan oleh guru dan pihak sekolah, siswa akan lebih mudah meneladani dan menerapkannya dalam kehidupan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa PKn memiliki potensi besar dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan peserta didik. Namun, untuk mengoptimalkannya, diperlukan pembaruan metode pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan kebijakan pendidikan yang mendorong penguatan nilai-nilai kebangsaan secara sistematis dan menyeluruh.

## KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. PKn tidak hanya berperan sebagai mata pelajaran wajib, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk generasi yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran PKn sangat dipengaruhi oleh metode pengajaran yang digunakan. Pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan dialogis terbukti lebih mampu membangun pemahaman mendalam serta menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam menjembatani teori dengan realitas kehidupan siswa sehari-hari.

Temuan juga menunjukkan bahwa PKn berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pembelajaran PKn menjadi wahana untuk memperkuat



kohesi sosial serta membangun identitas nasional yang inklusif dan terbuka.

Kendala dalam pembelajaran PKn masih ditemukan, terutama dalam aspek keterbatasan waktu, kecenderungan pendekatan hafalan, dan belum optimalnya integrasi antara teori dan praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam desain kurikulum, penyusunan bahan ajar, dan peningkatan kapasitas pendidik agar pembelajaran PKn benar-benar bermakna dan relevan dengan tantangan zaman.

Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menuntut PKn untuk terus beradaptasi agar tidak kehilangan relevansinya. Penggunaan media digital, diskusi interaktif daring, serta pengembangan konten yang menarik dan kontekstual menjadi langkah penting untuk mendekatkan materi PKn dengan kehidupan generasi muda masa kini.

Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pondasi penting dalam membangun bangsa yang beradab, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan penguatan implementasi PKn secara menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial dalam membangun masa depan Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

An-Nur. (2023). Maksud dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. An-Nur.ac.id.

Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

Hartono, S. (2022). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

IMM JPMIPA FKIP UAD. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. IMM JPMIPA FKIP UAD. Liputan6.com. (2021). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, Simak Sejarahnya. Liputan6.com.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan. Kumparan.com. (2023). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. Kumparan.com.

Madiong, B., dkk. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education. Jakarta: Penerbit XYZ.

Merdeka.com. (2021). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Begini Menurut Para Ahli. Merdeka.com.

Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD). Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8050–8054. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2297>



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. (2020). Dasar

Hukum Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ridhuan, S. (2018). Modul Pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan. Universitas Esa Unggul.

Safriadi, dkk. (2021). Teori dan Aplikasi Pendidikan

Kewarganegaraan. Jakarta: Penerbit ABC.

Siregar, S. (2024). Konsep Dasar Pendidikan

Kewarganegaraan. Jurnal PENDIS, 6(1), 45–56.

Triyanti, S. (2023). Perkembangan dan Konsep Pendidikan

Kewarganegaraan. Kompasiana.

Wuryan, R., & Syaifullah, M. (2008). Ilmu

Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn

Universitas Pendidikan Indonesia.

Z, M. F., & A. D., D. (2021). Pentingnya Pendidikan

Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter

Bangsa. Jurnal PEKAN, 6(1), 105–112.

Z, M. F., & A. D., D. (2021). Pentingnya Pendidikan

Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter

Bangsa. Jurnal PEKAN, 6(1), 105–112.